

DOKUMEN
PENGUMUMAN

KATEGORI
**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN
KONSTRUKSI (SMKK)**

No: 170/D23/DPPP/05/2025
Tanggal: 27 Mei 2025

Katalog Elektronik Sektoral

Pengelola Katalog Elektronik

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB 1 UMUM | 2 |
| 1.1 Ringkasan Kategori Produk | 2 |
| BAB 2 PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK | 3 |
| 2.1 Syarat Pelaku Usaha | 3 |
| 2.2 Kategori Produk | 4 |
| 2.3 Produk yang Dapat Ditawarkan | 6 |
| 2.4 Metode E-Purchasing | 6 |
| 2.5 Jenis Kategori Produk | 6 |
| 2.6 Kurasi Penayangan Produk | 6 |
| 2.7 Harga Zonasi | 7 |
| BAB 3 INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK | 8 |
| BAB 4 PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT | 9 |
| 4.1 Kategori Tingkat II: Kategori Penerapan SMKK | 9 |
| BAB 5 PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA | 12 |
| 5.1 Varian | 12 |
| 5.2 Harga Zonasi | 12 |
| 5.3 Layanan Tambahan | 12 |
| 5.4 Informasi Lainnya | 12 |

BAB 1
UMUM

1.1 Ringkasan Kategori Produk

| | | | |
|----|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Kategori Produk | : | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) |
| 2. | Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa | : | <input type="checkbox"/> Amanat Peraturan Perundang-undangan <input type="checkbox"/> Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik/Manajer Kategori Produk <input type="checkbox"/> Usulan dari Pelaku Usaha <input checked="" type="checkbox"/> Usulan untuk Pembuatan Kategori Produk pada Katalog Elektronik Sektoral dari Kementerian/Lembaga <input type="checkbox"/> Usulan/Kebutuhan terhadap Barang/Jasa tertentu dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (K/L/PD) b. Instansi selain K/L/PD yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ● Badan Layanan Umum (BLU) ● Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ● Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) ● Pemerintah Desa c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) |
| 3. | Nama Instansi Pengelola Katalog Elektronik | : | Kementerian Pekerjaan Umum |

BAB 2

PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL

KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

2.1 Syarat Pelaku Usaha

1. Menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Pengguna pada aplikasi Katalog Elektronik;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. KBLI yang dipersyaratkan pada seluruh Kategori Produk Tingkat III adalah:
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum (36001);
 - b. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya (37011);
 - c. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021);
 - d. Konstruksi Gedung Hunian (41011);
 - e. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);
 - f. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014);
 - g. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015);
 - h. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016);
 - i. Konstruksi Gedung Penginapan (41017);
 - j. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (41018);
 - k. Konstruksi Gedung Lainnya (41019);
 - l. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung (41020);
 - m. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101);
 - n. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102);
 - o. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201);
 - p. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202);
 - q. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (42203);
 - r. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (42207);
 - s. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (42209);
 - t. Konstruksi Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212);
 - u. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911);
 - v. Pengerukan (42914);

- w. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai (42922);
 - x. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930);
 - y. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (42921);
 - z. Penyiapan Lahan (43120);
 - aa. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221);
 - bb. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901);
 - cc. Pemasangan Perancah (Steiger) (43902);
 - dd. Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (43903);
 - ee. Pemasangan Kerangka Baja (43904); atau
 - ff. Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 4. Memiliki Akta Pendirian beserta Akta Perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Badan Usaha;
 5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

2.2 Kategori Produk

| Kategori Tingkat I | Kategori Tingkat II | Kategori Tingkat III |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) | Penerapan SMKK | Komponen 1 SMKK (Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK) |
| | | Komponen 2 SMKK (Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan) |
| | | Komponen 3 SMKK (Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri) |
| | | Komponen 4 SMKK (Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi) |
| | | Komponen 5 SMKK (Personel Keselamatan Konstruksi) |
| | | Komponen 6 SMKK (Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) |
| | | Komponen 7 SMKK (Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas) |
| | | Komponen 8 SMKK (Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi) |

| Kategori Tingkat I | Kategori Tingkat II | Kategori Tingkat III |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Komponen 9 SMKK (Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi) |

2.3 Produk yang Dapat Ditawarkan

Produk yang dapat ditawarkan oleh Pelaku Usaha adalah Produk yang termasuk dalam Kategori Produk pada Tingkat I, II, dan III yang ditetapkan dalam Penelaahan Kategori Produk ini.

2.4 Metode E-Purchasing

Merupakan metode *E-Purchasing* katalog yang berkenaan untuk dilakukan pembelian oleh PP/PPK yaitu:

- Negosiasi
- Mini Kompetisi
- Negosiasi dan Mini Kompetisi

Pada seluruh kategori produk tingkat III

2.5 Jenis Kategori Produk

Jenis Kategori Produk Tingkat III:

- Kategori Produk Umum
- Kategori Produk Khusus

Kategori khusus dibuat berdasarkan data Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta data lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

2.6 Kurasi Penayangan Produk

Penerapan Kurasi Produk terhadap Perizinan Wajib suatu Kategori Produk Tingkat III:

- Ya
- Tidak

A. Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Pokok

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Kriteria SNI

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki SNI maka harus memiliki Data Sertifikasi SNI yang sesuai dengan produk tersebut.

2. Kriteria Merek

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki Merek maka harus memiliki Data Merek yang sesuai dengan Kelas Barang/Jasa produk tersebut.

Keterangan:

Kurasi pada atribut informasi pokok sebagaimana yang disebutkan pada Bagian A tentang Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Pokok tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik, namun data nilai SNI dan/atau Merek tidak akan muncul sebelum disetujui oleh Kurator.

B. Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Utama

1. Keterangan Kategori Tingkat II: Kategori Penerapan SMKK.

- a. Produk ditayangkan oleh Penyedia yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi yang Masih Berlaku sesuai ketentuan.
- b. Penyedia yang menayangkan produk memiliki Sertifikat Standar sesuai ketentuan.
- c. Produk yang akan ditayangkan harus sesuai dengan kategori produk yang dicantumkan.
- d. Pengecekan pengisian data PPN pada harga tayang produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan :

Kurasi pada atribut informasi utama diatas tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada katalog elektronik, namun terdapat keterangan “Produk masih dalam proses kurasi”. Keterangan tersebut akan hilang jika produk lulus kurasi pada atribut informasi utama diatas. Namun produk akan turun tayang jika tidak lulus pada atribut informasi utama diatas.

2.7 Harga Zonasi

Penerapan Harga Zonasi terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

Ya

Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III Menggunakan Zona Harga Kabupaten/Kota.

BAB 3
INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK

Informasi Atribut pada kategori produk terdapat 3 jenis Atribut, yaitu Informasi Pokok, Informasi Utama dan Informasi Lainnya.

| No | Kategori Tingkat I | Informasi Pokok | Informasi Utama | Informasi Lainnya |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) | 1) Informasi Dasar Produk 2) KBKI 3) Informasi PDN 4) Informasi TKDN 5) SNI 6) Merek 7) Informasi Harga 8) Informasi Stok 9) Informasi Pengiriman | 1) Satuan Pengukuran 2) Kode Produk 3) Lingkup Kegiatan 4) Lokasi Layanan (Kecamatan) 5) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi 6) Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi 7) Sertifikat Standar 8) Komponen Struktur Biaya Tayang | 1) Informasi Lainnya |

BAB 4
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT

Petunjuk pengisian atribut dibuat untuk menjelaskan atribut yang melekat pada kategori maupun sub kategori yang sudah ditetapkan.

4.1 Kategori Tingkat II: Kategori Penerapan SMK

| No | Atribut | Status Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|----------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Informasi Pokok | | |
| 1.1 | Informasi Dasar Produk | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Informasi Dasar Produk Antara Lain Nama Produk dan Foto Produk |
| 1.2 | KBKI | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) |
| 1.3 | Informasi PDN | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Informasi PDN (Lokal/Impor) Jika Penyedia memilih PDN maka Negara Asal Pembuatan Produk akan terisi Indonesia Jika Penyedia memilih Impor maka Penyedia diwajibkan untuk mengisi Negara Asal Pembuatan Produk |
| 1.4 | SNI | Tidak Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat SNI (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat SNI) Atau Tidak Memiliki |
| 1.5 | Merek | Tidak Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Merek (Dengan Memasukan Nomor Pendaftaran Merek) Atau Tidak Memiliki |
| 1.6 | Informasi Harga | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Harga Satuan dan Harga Grosir (Jika ada) Harga menggunakan zonasi Kabupaten/Kota |

| No | Atribut | Status Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7 | Informasi Stok | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Stok dan Satuan Barang a. Normal (Menggunakan Stok Produk) Tampilan stok normal digunakan apabila stok tersedia b. Pre Order Tampilan stok Pre-Order digunakan apabila stok inden |
| 2 | Informasi Utama | | |
| 2.1 | Satuan Pengukuran | Wajib Diisi | Satuan pengukuran akan terisi secara otomatis berdasarkan data master produk yang ditetapkan oleh Pengelola Katalog (apabila fitur telah tersedia) Contoh: Meter Kubik, Meter Persegi, Meter Panjang, Ton, Kilogram, Buah, Liter, Lump Sum, Jam |
| 2.2 | Kode Produk | Wajib Diisi | Kode produk akan terisi secara otomatis berdasarkan data master produk yang ditetapkan oleh Pengelola Katalog (apabila fitur telah tersedia). Contoh: 1.20.(1) |
| 2.3 | Lingkup Kegiatan | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Lingkup Kegiatan |
| 2.4 | Lokasi Layanan (Kecamatan) | Wajib Diisi | Berisi informasi lokasi yang dilayani oleh Penyedia (tingkat kecamatan) Contoh: Kecamatan Cengkareng, Tambora, Palmerah. |
| 2.5 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi Contoh: Memiliki SBU Apabila memiliki, maka Penyedia dapat mengunggah dokumen bukti kepemilikan (File Upload). |

| No | Atribut | Status Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6 | Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi |
| 2.7 | Sertifikat Standar | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Kepemilikan Sertifikat Standar Contoh: Memiliki Apabila memiliki, maka Penyedia dapat mengunggah dokumen bukti kepemilikan (File Upload). |
| 2.8 | Komponen Struktur Biaya Tayang | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Komponen Struktur Biaya Tayang Contoh: Harga tayang sudah termasuk biaya: Biaya Material/Produksi; Biaya Tenaga Kerja; Biaya Peralatan; Biaya Pengujian Pengendalian Mutu; Biaya Pengerjaan/Pemasangan; Biaya Pengangkutan (bila diperlukan); Biaya Pengemasan (bila diperlukan); dan Biaya Retribusi dan pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Penyedia dapat mengunggah dokumen komponen struktur biaya tayang. |
| 3 | Informasi Lainnya | | |
| 3.1 | Informasi Lainnya | Tidak Wajib Diisi | Berisi Informasi Tambahan Pada Produk Tersebut dan File Upload Jika Diperlukan |

BAB 5

PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA

Petunjuk penjelasan fitur dan informasi lainnya atas proses pendaftaran dan pencantuman produk pada katalog elektronik.

5.1 Varian

- a. Tipe Varian
Masukan tipe varian berdasarkan kebutuhan
- b. Pilihan Varian
Masukan pilihan varian berdasarkan kebutuhan
Rincian dari varian dapat diunggah pada kolom unggahan dokumen pendukung lainnya.

5.2 Harga Zonasi

Merupakan pemilihan untuk mengaktifkan fitur Harga Zonasi yang berlaku pada Kategori Tingkat III. Apabila Harga Zonasi tidak aktif maka harga tayang produk menggunakan zona harga Nasional, namun apabila fitur harga zonasi diaktifkan maka harga tayang produk dapat menggunakan zona harga Provinsi atau Kabupaten/Kota.

5.3 Layanan Tambahan

- a. Jenis Produk
 1. Fisik/Digital
 2. Jasa
 3. Asuransi
- b. Jenis Layanan
Opsi untuk memilih jenis layanan untuk satu layanan atau lebih
- c. Pembelian Layanan
Opsi untuk membeli layanan untuk setiap pembelian produk atau dengan keseluruhan total pembelian produk (akumulasi)

5.4 Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai

dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.

3. Harga Tayang merupakan harga satuan tertinggi yang minimal sudah termasuk biaya:
 - a. Retribusi
 - b. Keuntungan
 - c. Pungutan lain yang sah
 - d. Biaya Bea dan Overhead
 - e. Pajak Pertambahan Nilai (Jika ada)
 - f. Pajak Daerah (Jika ada)
 - g. Pajak Lainnya yang Berlaku (Jika ada)
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dapat melakukan pembelian produk pada Kategori Tingkat III sesuai dengan metode E-Purchasing sesuai dengan butir 2.4 pada BAB 2 Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa dan Profil Kategori Produk Pada Katalog Elektronik.
5. Penyedia Katalog Elektronik dapat dibebankan biaya tambahan pada setiap transaksi *E-Purchasing* yang meliputi:
 - a. PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan terkait jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Biaya tanda tangan elektronik dan materai elektronik;
 - c. Biaya pembayaran (sesuai dengan metode bayar yang dipilih);
 - d. Biaya *disbursement* (sesuai dengan metode bayar yang dipilih); dan
 - e. Biaya lainnya (apabila ada).

Jakarta, 27 Mei 2025

Direktur Pasar Digital Pengadaan

Yulianto Prihhandoyo

NIP: 197107311998031005